

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Paparan Data

Paparan data berisi tentang informasi yang dihasilkan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian di SMPN 2 Larangan, baik berupa data wawancara, observasi, ataupun dokumentasi. Berikut ini peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu: “Manajemen Konflik Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Suasana Kondusif Belajar Siswa di SMPN 2 Larangan Pamekasan.”

Sebelum melanjutkan paparan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti akan memaparkan gambaran umum dari SMPN 2 Larangan Pamekasan yang meliputi profil sekolah. Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berlokasi di SMPN 2 Larangan Pamekasan sekolah yang berakreditasi A. Jalan Raya Talang Kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan.

a. Profil Sekolah SMPN 2 Larangan Pamekasan

SMPN 2 Larangan Pamekasan yang terletak di jalan raya Talang Kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan sudah mulai berdiri dari tahun 1997. Dengan luas tanah 8.450 m² dan luas bangunan 2021 m². Serta sudah ada fasilitas seperti lapangan, aula, sound system, tempat duduk siswa, kolam, taman dan guru serta perlengkapan belajar lainnya serta perpustakaan yang sudah mempunyai fasilitas belajar yang nyaman

untuk para siswa belajar. Adapun Visi SMP Negeri 2 Larangan Pamekasan adalah unggul dalam prestasi sehat, berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan taqwa. Adapun untuk mewujudkan visi diatas, terdapat sejumlah misi yang diupayakan secara terus menerus yakni:

- 1) Membentuk dan mengembangkan insan beriman dan bertaqwa serta saling menghormati antara umat beragama (religius).
- 2) Melaksanakan bimbingan dan pembelajaran kontekstual sehingga peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
- 3) Membentuk insan berprestasi (unggul) dibidang akademik maupun non akademik.
- 4) Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, ramah, aman, rindang, dan indah.
- 5) Melaksanakan manajemen berbasis sekolah.
- 6) Membentuk insan berkarakter luhur pada budaya bangsa, demi tercapainya pelestarian serta pencegahan proses kerusakan lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan.

Adapun tujuan pendidikan di SMPN 2 Larangan Pamekasan bertujuan:

- 1) Unggul dalam kegiatan keagamaan dan kepedulian sekolah
- 2) Unggul dalam perolehan nilai UAN
- 3) Unggul dalam persaingan masuk ke jenjang SMA/SMK Negeri
- 4) Unggul dalam penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama bidang sains dan matematika
- 5) Unggul dalam lomba olah raga, Kesenian, PMR dan Pramuka
- 6) Unggul dalam kebersihan dan penghijauan sekolah

Adapun Struktur kepengurusan di SMPN 2 Larangan sebagai berikut:

Kepala Sekolah	: Syamsul Arifin
Ketua Komite	: Ir. H. Wahid Hasyim
Wakil Kepala Sekolah	: Sri Wartini S.Pd. Hares, S. Pd.
UR. Kurikulum	: Rasyidah M.Pd
UR. Kesiswaan	: Yuliati, M.Pd.
UR.SARPRAS	: Mas Udi , S.Ag
UR.HUMAS	: Abd. Salam S. Pd.
Kepala TU	: Syaiful Bahri, S. A. P

Selanjutnya peneliti telah Menyusun rumusan dalam sebuah fokus penelitian, pembahasan dalam memahami paparan data hasil yang ditemukan dalam penelitian ini, maka dengan hal itu peneliti akan menyajikan dalam bentuk sub pokok pembahasan sebagai berikut.

b. Penerapan Manajemen Konflik Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Suasana Kondusif Belajar Siswa Di SMPN 2 Larangan Pamekasan.

Dalam penerapan observasi yang di lakukan oleh peneliti bertepatan pada tanggal 10 april 2023 menghasilkan pemahan yaitu bahwasannya kepala sekolah dengan di bantu guru bimbingan konseling dalm menerapkan Manajemen Konflik Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Suasana Kondusif Belajar Siswa, sebelumnya melaksanakan sebuah penelitian untuk mengidentifikasi konflik yang akan terjadi, dan juga melakukan pemetaan terhadap jenis jenis konflik, penerapan manajemen konflik yang di lembagakan tentunya diperlukan sebuah persiapan terlebih dahulu seperti membentuk komponen yang akan terlibat dalam manajemen konflik berbasis sekolah. Penerapan manajemen konflik berbasis sekolah ini dilaksanakan tidak lepas dari sebuah upaya untuk menciptakan suasana yang nyaman, aman dan kegiatan belajaer mengajar berjalan dengan lancer sehingga terciptalah suasana kondusif belajar siswa dalam meningkatkan optimalisasi pembelajaran itu sendiri.

Dalam menerapkan manajemen konflik berbasis sekolah bapak Syamsul Arifin selaku kepala sekolah memfasilitasi para pendidik dan tenaga pendidik dalam memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai pentingnya penerapan manajemen konflik di sekolah, yaitu dengan memberikan waktu khusus untuk mengajarkan pengetahuan,

keterampilan dan pemahaman mengenai manajemen konflik, sehingga bisa diintegrasikan dalam setiap aktifitas pendidik, tenaga pendidik maupun siswa selama di sekolah. Pemahaman mengenai manajemen konflik berbasis sekolah sangatlah penting, mengingat mereka merupakan komponen yang terlibat langsung dalam setiap interaksi sosial yang terjadi di sekolah. Sehingga apabila apabila setiap elemen yang ada di sekolah tidak di bekali pemahaman maka ketika terjadi konflik, sangatlah sulit untuk bekerja sama dalam mencari solusi atau jalan keluar, karena sekolah masih di sibukkan untuk mengenalkan setiap elemen yang ada di sekolah pemahaman manajemen konflik itu sendiri. Dengan demikian pemahaman mengenai manajemen konflik tidak di jadikan materi yang sifatnya formal seperti harus menghafal, di catat, ataupun bahkan di latih. tetapi justru menjadi ciri tersendiri sebagai keterampilan hidup bagi peserta didik, pendidik maupun siswa dalam melakukan interaksi sosial selama di sekolah sehingga manajemen konflik berbasis sekolah menjadi kurikulum proses tersendiri.

Hal ini sesuai dengan pengakuan dari hasil wawancara dengan kepala sekolah di SMPN 2 Larangan Pamekasan yang mengatakan:

Untuk menerapkan manajemen konflik tidaklah mudah kita harus mengidentifikasi konflik-konflik yang akan terjadi di sekolah, karena beda sekolah pasti berbedapula konflik yang akan di hadapi, setelah itu baru kita memberikan pemahaman kepada guru-guru maupun murid tentang pemahaman manajemen konflik itu sendiri, sehingga mereka mempunyai gambaran dan pemahaman tersendiri tentang bagaimana manajemen konflik itu bisa di terapkan di sekolah ini, sehingga timbulah yang namanya kesadaran-kesadaran.¹

¹ Syamsul Arifin, Kepala Sekolah SMPN 2 Larangan, Wawancara Langsung (10 april 2023).

Adapun waktu yang di gunakan untuk memberikan pemahaman dan pelatihan keterampilan dalam manajemen konflik di SMPN 2 Larangan Pamekasan sifatnya kondisional, ada yang sifatnya segerara sesuai dengan adanya tuntutan untuk segera menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung atau konflik yang sifatnya darurat. Sehingga di perlukan keselarasan pemikiran dalam mendefinikan konflik, sehingga memepermudah dalam pengidentifikasiannya. Ada yang sifatnya setiap semester yang di satukan dengan serap aspirasi dari para guru-guru mengenai program dan produktivitas sekolah, bahkan hal-hal yang menghambat terhadap kegiatan di sekolah.

Yang demikian biasanya waktu yang di gunakan adalah setelah jam pelajaran, hari libur, jam istirahat atau bahkan ketika jam pelajaran, tentunya dengan catatan tidak mengganggu aktivitas pembelajaran, atau tidak melibatkan guru guru yang sedang mengajar.

Sekolah juga memanfaatkan kegiatan semisteran yaitu ketika pemberian raport pada orang tua atau wali siswa, yaitu dengan menyiapkan waktu husus untuk sharing dengan orang tua siswa atau walinya, dan bahkan ada yang di kumpulkan secara khusus yaitu untuk investigasi dan bisa mencari alternatif terhadap siswa-siswa yang di nilai cukup nakal, sehingga sangat penting untuk melibatkan orang tua.

Sesuai dengan pengakuan dari hasil wawancara dengan kepala sekolah di SMPN 2 Larangan Pamekasan yang mengatakan:

Adapun waktu yang di gunakan sifatnya bervariasi, sesuai dengan kebutuhan, kita bisa gunakan persemester, tahunan atau jangka pendek. Biasanya kita adakan pertemuan yang membahas

menegenai manajemen konflik, setelah jam sekolah, jam istirahat, hari libur, atau ketika jam pelajaran kalo itu di perlukan, tapi tentunya tidak menggu kegiatan mengajar di kelas, kalo yang rutin yaitu ketika pemberian rapot, pasti kita sempatkan juga untuk sharing-sharing dengan orang tua siswa.²

Kepala sekolah dalam menciptakan suasana lingkungan sekolah yang kondusif menilai sangatlah penting untuk mempengaruhi setiap aktivitas dari sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Di antaranya adalah merancang proses belajar dan mengajar yang tidak terpaku pada keterampilan akademik saja, Tetapi komponen penting lainnya juga perlu di perhatikan seperti keterampilan sosial dan cara beretika di sekolah . Hal ini dinilai sangat penting, dan menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah. Karena hal ini selain bermanfaat bagi pendidik dan tenaga pendidik tapi juga memberikan siswa kemampuan menghadapi masalah dan mengelola konflik serta bisa dilatih kecerdasan emosional, dan tentunya bisa menanamkan karaakter yang baik, seperti berbudi pekerti atau akhlak yang baik.

Adapun kurikulum proses adalah penanaman pemahaman manajemen konflik berbasis sekolah dalam bingkai toleransi, saling menghargai dan menghormati keanekaragaman yang terdapat di sekolah, pemahaman tersebut di berikan oleh seorang guru kepada murid-muridnya, dengan mendesain kegiatan belajar di kelas yang di korelasikan dengan pemahaman manajemen konflik, saling menghormati, dan kerjasama dalam kelompok. Seperti dalam pelajaran

² Syamsul Arifin, Kepala Sekolah SMPN 2 Larangan, Wawancara Langsung (10 april 2023).

olahraga bukan hanya focus terhadap pada materinya tetapi juga menjelaskan tentang pentingnya menjaga sportifitas karena hal itu dapat menyokong suksesnya kegiatan olahraga, dalam Ilmu Pendidikan Sosial murid di ajarkan sosial kemasyarakatan tetapi juga di ajarkan bagaimana sikap empati, peduli, menghargai pendapat orang lain, memahami perbedaan sosial yang mempengaruhi terhadap psikologis dan karakter seorang anak, dalam ilmu kenegaraan yang membahas berbagai suku ras dan budaya murid juga di ajarkan tentang pentingnya toleransi dan menjaga kerukunan baik antar ras suku maupun agama, dalam Bahasa Indonesia juga di ajarkan untuk mencintai Bahasa persatuan, tentunya juga menghormati keanekaragaman Bahasa, dengan memberikan tugas opini cerpen ataupun puisi yang membahas tentang kekompakan, kerjasama, persatuan dan hal-hal yang menjunjung nilai-nilai persaudaraan. Begitupun dalam pelajaran yang lain yang di konsep dan di desain sedemikian rupa untuk mengintegrasikan manajemen konflik berbasis sekolah dalam materi pembelajaran yang ada di kelas, sehingga dengan sendirinya teori manajemen konflik berbasis sekolah menjadi kurikulum proses bagi peserta didik, sehingga bisa di jadikan pedoman dalam setiap interaksi yang ada di sekolah.

SMPN 2 Larangan juga menerapkan sekolah yang damai, seperti guru-guru menyambut siswa ketika pagi di depan pintu gerbang, sambil lalu memberikan arahan bagi siswa yang atributnya tidak lengkap, Tindakan demikian di maksudkan untuk membangun kedekatan antara guru dengan siswa agar terjalin emosional, tanpa harus memberikan

hukuman fisik. Sehingga jika siswanya tetap melanggar nanti akan di pasrahkan pada guru bimbingan konseling, agar di agendakan kelas mediasi.

Sesuai dengan pengakuan dari hasil wawancara dengan kepala sekolah di SMPN 2 Larangan Pamekasan yang mengatakan:

Penerapan manajemen konflik berbasis sekolah di sini sudah berjalan walupun secara bertahap. Seperti menanamkan nilai toleransi, kepedulian, cinta ke anekaragaman dan juga hal-hal yang menjadi terjadinya sumbu konflik beserta solusinya yang diintegrasikan kedalam materi ajar yang di desain oleh guru-guru sedemikian rupa, sehingga dengan demikian manajemen konflik berbasis sekolah bisa di padukan dengan semua disiplin keilmuan, yang tentunya itu akan menjadi pengalaman tersendiri bagi peserta didik, dan hal demikian juga bisa menghemat waktu dalam menanamkan materi manajemen konflik kepada peserta didik. Suasana sekolah yang damai itu akan memberikan kesan tersendiri bagi peserta didik.³

Manajemen konflik berbasis sekolah di SMPN 2 larangan terdiri dari ketentuan yang di desain melalui beberapa pendekatan yaitu kurikulum proses, sekolah yang nyaman dan aman anti bullying dan sistem mediasi.

kepala sekolah juga di bantu oleh guru bimbingan konsling (BK) dalam menerapkan strategi manajemen konflik berbasis sekolah, guru bimbingan konseling terlibat secara langsung dengan pesertadidik. Selain memediasi secara langsung terhadap peserta didik yang mengalami konflik interpersonal maupun intrapersonal, Guru bimbingan konseling juga melakukan pendekatan teori MKBS yaitu penerapan anti perundungan (anti-bulliying) serta peran keluarga dan bahkan masyarakat.

³ Syamsul Arifin, Kepala Sekolah SMPN 2 Larangan, Wawancara Langsung (17 april 2023).

Guru bimbingan konseling di SMPN 2 Larangan selain mengharapkan para peserta didiknya mempunyai kecerdasan juga diharapkan mempunyai beberapa keterampilan khususnya kemampuan untuk bisa mengidentifikasi konflik, seperti keahlian untuk memediasi. Karena mediasi bisa di gunakan untuk pemeperbaiki system tradisional seperti skorsing , punishment/ hukuman yang berupa fisik terhadap siswa, yang tentunya bisa mengganggu terhadap psikologis para peserta didik. Mediasi adalah mencari jalan alternatif dengan menggunakan perundingan dan melibatkan pihak ketiga, atau mediator. Program mediasi sejawat sangatlah penting untuk di perhatikan, program ini biasanya di sebut peer mediation. Peer mediation adalah mediasi yang di lakukan terhadap dua siswa atau lebih dengan menggunakan bantuan mediator, atau orang ketiga yang bertugas untuk menyelesaikan problem atau konflik yang sedang terjadi, uniknya pihak ketiga merupakan salah satu dari siswa juga. Yang tentunya sudah mengikuti pelatihan mediasi.

Peer mediation dirancang secara terstruktur sehingga siswa memungkinkan bisa menyelesaikan problemnya dengan bantuan dari mahasiswa lain. Kelas mediasi di Kelola oleh guru yang sudah melakukan pelatihan mediasi. Adapun produk akhirnya adalah bisa menyelesaikan konflik atau problem yang di alami oleh siswa, dengan bantuan siswa lain dengan di damping oleh guru yang memandu jalanya mediasi, denga berupa kesepakatan bersama. Dan apabila di kemudian hari hasil kesepakatannya di langgar oleh pihak terkiat maka bisa menggunakan alternatif selanjutnya, yaitu dengan melibatkan guru

bimbingan konseling, atau bahkan di intervensi oleh kepala sekolah. Dalam peer mediation konflik atau problem juga di sesuaikan dengan kemampuan dan kapabilitas siswa.

Sesuai dengan pengakuan dari hasil wawancara dengan bapak hairus S.Pd yang merupakan guru bimbingan konseling di SMPN 2 Larangan Pamekasan yang mengatakan:

Di SMPN 2 Larangan memang sudah menerapkan manajemen konflik berbasis sekolah, memang sebelumnya kepala sekolah mensosialisasikan kepada kami semua terkait manajemen konflik berbasis sekolah. Karena selain mengharapkan para peserta didiknya mempunyai kecerdasan, juga diharapkan mempunyai beberapa keterampilan khususnya kemampuan untuk bisa mengidentifikasi konflik, seperti keahlian untuk memediasi. Ini sangat penting, Karena bisa di gunakan untuk pemeperbaiki system tradisional seperti skorsing , punishment/ hukuman yang berupa fisik terhadap siswa, dan itu merupakan bagian dari cara untuk membentuk karakter siswa. Salah satu dari teori manajemen konflik berbasis sekolah adalah Peer mediation yaitu mediasi yang di lakukan terhadap dua siswa atau lebih dengan menggunakan bantuan mediator, atau orang ketiga yang bertugas untuk menyelesaikan problem atau konflik yang sedang terjadi, dan tim mediator kami ambil dari salah satu siswa juga. produk akhirnya adalah bisa menyelesaikan konflik atau problem yang di alami oleh siswa, dengan bantuan siswa lain dengan di damping oleh guru yang memandu jalanya mediasi, denga berupa kesepakatan bersama. Dan apabila di kemudian hari hasil kesepakatannya masih di langar, maka bisa menggunakan alternatif selanjutnya, yaitu dengan melibatkan guru bimbingan konseling, atau bahkan di intervensi oleh kepala sekolah. pastinya untuk konflik atau problemnya kami sesuaikan dengan kemampuan dan kapabilitas mereka serta memanggil orang tua atau wali murid untuk datang ke sekolah agar bisa menyelesaikan konflik yang dilakukan oleh anaknya.⁴

Penanaman pemahaman manajemen konflik di sekolah sangatlah penting. Karena bisa menanamkan nilai kerukunan, anti kekerasan, dan prilaku positif, dengan demikian kita menciptakan sekolah yang aman

⁴ Hairus, Guru Bimbingan Konseling Sekolah SMPN 2 Larangan, Wawancara Langsung (17 april 2023).

dan kelas yang damai, dan bisa menciptakan Suasana kondusif di sekolah, dengan demikian siswa bisa berkonsentrasi untuk belajar. Dengan menanamkan manajemen konflik berbasis sekolah, maka untuk menanamkan suasana kondusif tidak memerlukan polisi, pengamanan sekolah, atau sistem elektronik untuk segala aktivitas. Cukup dengan menanamkan nilai-nilai kesadaran.

Suasana kondusif belajar akan tercipta dengan minimnya konflik di sekolah, atau penyelesaian konflik secara terstruktur. Suasana belajar yang kondusif sangatlah penting untuk dipertahankan demi perkembangan peserta didik efektif dan efisien, sehingga tujuan tercapai secara optimal.

Adapun yang sangat berdampak terhadap pola social siswa adalah penggunaan media elektronik yang tidak di manfaatkan secara maksimal, polarisasi dunia luar gampang di akses, seperti video tauran, bullying dan tindakan kekerasan lainnya, di SMPN Larangan 2 Pamekasan secara konflik kelompok seperti tauran antar sekolah hamper tidak pernah terejadi, selain factor geografis sekolah yang jauh dari jangkauan sekolah lain, para guru juga inten memantau pola intereaksi siswa secara universal. Tetapi untuk kekerasan yang sifatnya internal seperti bullying di semua sekolah pasti terjadi, dengan pola dan intensitas yang berbeda begitupun di SMPN Larangan 2 Pamekasan.

Pihak yang terlibat dalam bullying atau perundungan adalah pelaku, korban dan penonton. pelaku dengan di temani beberapa teman-temannya menjadi actor utama, biasanya pelaku cenderung dari keluarga

yang sering menggunakan kekerasan atau hukuman fisik terhadap anak-anaknya. Adapun korban biasanya cenderung berasal dari keluarga yang mengalami kelemahan komunikasi, ataupun pola interaksi antar masyarakat ataupun dalam keluarga. Adapun pihak ketiga cenderung hanya menonton, ada yang mendukung, menertawakan dan ada yang hanya diam tidak melakukan apa-apa.

Tindakan bullying ini merupakan Tindakan yang cukup serius berdampak pada psikologis anak, dan biasanya sifatnya tahunan, tentu demikian akan mengganggu terhadap kondusivitas belajar siswa. Sekolah SMPN 2 Larangan memfasilitasi korban ataupun penonton untuk melaporkan Tindakan bullying pada guru, guru bimbingan konseling atau kepala sekolah. SMPN 2 Larangan menerapkan kelas damai yaitu kelas yang dibentuk oleh guru untuk sama-sama menolak terhadap segala bentuk kekerasan, seperti guru memberikan pemahaman pada peserta didik tentang tipologi, dan karakteristik siswa, perbedaan ras, suku, budaya, agama, dan cara pandang setiap manusia yang berbeda dengan lingkungan dan pola interaksi keluarga yang berbeda. sehingga siswa tidak memandang negative terhadap siswa yang memiliki kekurangan secara fisik ataupun mental. Tindakan pencegahan bullying perlu diterapkan demi menjaga kognisi dan emosi para peserta didik.

Sesuai dengan pengakuan dari hasil wawancara dengan bapak hairus S.Pd yang merupakan guru bimbingan konseling di SMPN 2 Larangan Pamekasan yang mengatakan:

Suasana kondusif belajar akan tercipta dengan minimnya konflik di sekolah dengan penyelesaian konflik secara terstruktur. Suasana

belajar yang kondusif sangatlah penting untuk dipertahankan untuk perkembangan peserta didik yang efektif dan efisien. Adapun yang sangat berdampak terhadap pola social siswa adalah penggunaan media elektronik yang tidak di manfaatkan secara maksimal, polarisasi dunia luar gampang di akses, seperti video tauran, bullying dan tindakan kekerasan lainnya. Di SMPN Larangan 2 Pamekasan konflik kelompok seperti tauran antar sekolah hampir tidak pernah terejadi, selain factor geografis sekolah yang jauh dari jangkauan sekolah lain, para guru juga inten memantau pola intereaksi siswa secara universal. Tetapi untuk kekerasan yang sifatnya internal seperti bullying di semua sekolah pasti terjadi, dengan pola dan intensitas yang berbeda pula. Begitupun di SMPN Larangan 2 Pamekasan tindakan bullying ini merupakan tindakan yang cukup ssering terjadi. hal ini cukup berdampak serius pada siskologis siswa, dan biasanya sifatnya tahunan, tentu demikian akan mengganggu terhadap kondusivitas belajar siswa. Sekolah SMPN 2 Larangan memfasilitasi korban ataupun penonton utuk melaporkan Tindakan pelaku bullying pada guru, guru bimbingan konseling atau kepala sekoah. Sehingga kami menerapkan kelas damai yaitu guru meberikan pemahan pada peserta didik tentang tipologi, dan karakteristik siswa, sehingga siswa tidak memandang negative terhadap siswa yang memiliki kekurangan secara fisik ataupun mental.⁵

Dari hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam penerapan manajemen konflik berbasis sekolah di SMPN 2 Larangan, kepala sekolah beserta guru bimbingan konseling dan guru-guru mengidentifikasi terlebih dulu konflik yang akan terjadi sehingga di perlukan pemetaan konflik ataupun tim yang nantinya akan membantu kepala sekolah dalam mengatasi konflik yang terjadi.

Sedangkan menurut bapak Taufiqur Rahman selaku salah satu wali kelas di SMP Negeri 2 Larangan memaparkan bahwa:

Untuk pelaksanaan manajemen konflik berbasis sekolah di SMP Negeri 2 Larangan memang sudah terlaksana, Langkah awal yang dilakukan ialah mengadakan sosialisasi terhadap semua guru dan civitas akademika SMP Negeri 2 Larangan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan program manajemen konflik berbasis sekolah yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Larangan. Kepala

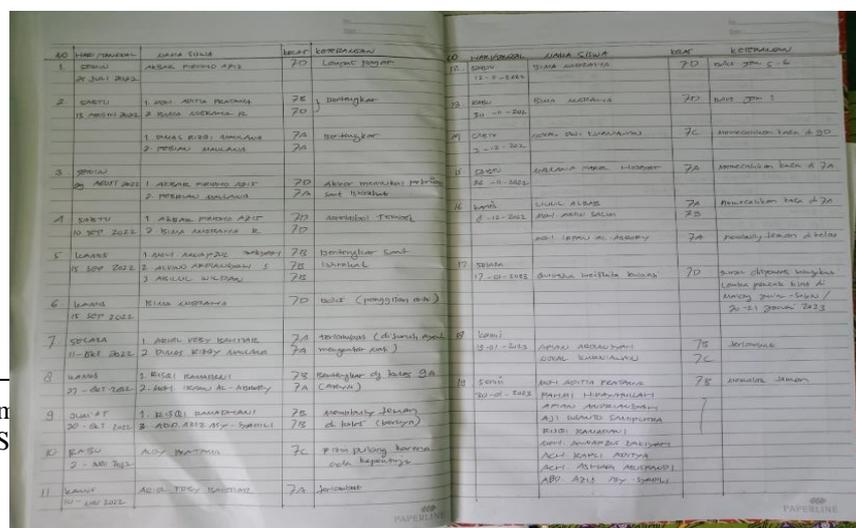
⁵ Hairus, Guru Bimbingan Konseling Sekolah SMPN 2 Larangan, Wawancara Langsung (17 april 2023).

sekolah berharap semua yang bersangkutan bisa melaksanakan program tersebut dengan maksimal.⁶

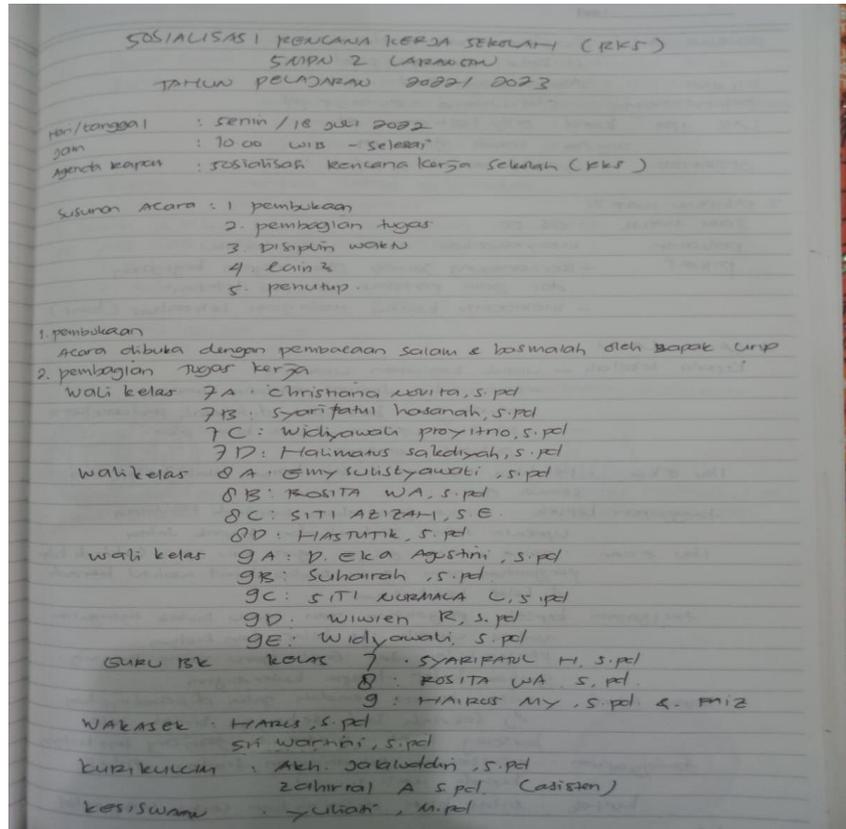
Pernyataan lainnya juga dipaparkan oleh salah satu siswa SMP Negeri 2 Larangan pamekasan yaitu Rizal, ia menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan manajemen konflik disekolanya. Berikut penuturannya:

Salah satu pelaksanaan manajemen konflik berbasis sekolah itu setiap satu smester sekali guru memberikan angket kepada kami untuk diisi tentang penilaian antar teman setelah itu kami kumpulkan terhadap guru bimbingan konseling di sekolah kami, beliau juga berjanji untuk menjaga rahasia kami semua karena kami merasa takut dapat intimidasi dari teman yang lain apalagi teman yang selalu membuat onar atau selalu melakukan bullying terhadap siswa yang lain. Ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti contohnya pertengkaran di sekolah sampai membawa orang luar untuk melibatkan pertengkaran tersebut maka guru bimbingan konseling dan juga persetujuan dari kepala sekolah untuk memanggil orang tua atau wali nya untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan damai.⁷

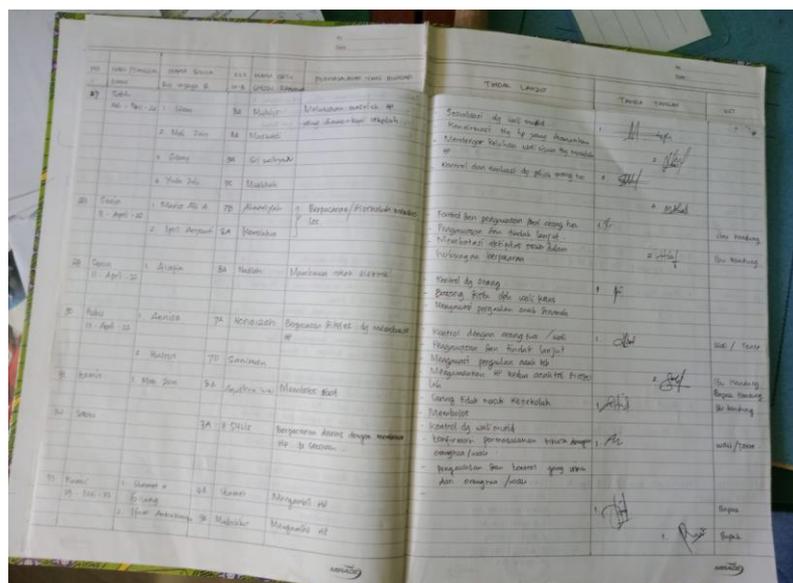
⁶ Taufiqur Rahn
⁷ Rizal, siswa S



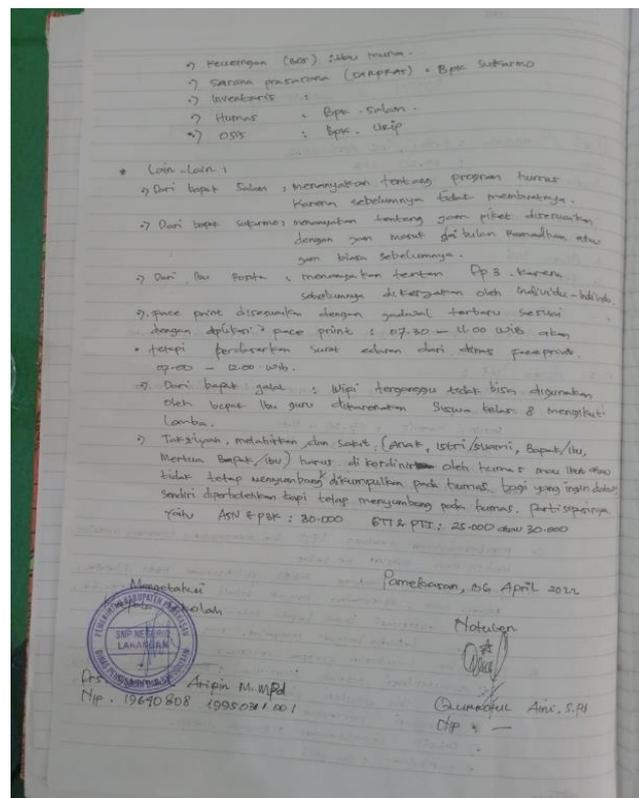
Gambar. 4.1 Pemanggilan Peserta didik yang melanggar



Gambar. 4.2 Sosialisasi Rencana Kerja Sekolah



Gambar. 4.3 Daftar Hadir Pemanggilan Orang Tua



Gambar. 4.4 Rapat Tentang Program Sekolah

c. Faktor Penghambat Implementasi Manajemen Konflik Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Suasana Kondusif Belajar Siswa di SMPN 2 Larangan Pamekasan?

Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan manajemen konflik berbasis sekolah di SMPN 2 Larangan Pamekasan.

peneliti telah melakukan observasi pada tanggal 17 Mei 2023 dengan kepala sekolah.

Faktor penghambat dalam penerapan manajemen konflik berbasis sekolah di SMPN 2 Larangan adalah pemahaman terhadap penerapan manajemen konflik berbasis sekolah, apalagi ketika kepala sekolah yang baru menjabat, dan sebelumnya belum pernah diterapkan manajemen konflik berbasis sekolah, sehingga dalam implementasinya harus terstruktur dan terkonsep dengan rapi. Mengingat manajemen konflik berbasis sekolah yang sangat kompleks dengan melibatkan semua pihak yang ada di sekolah. Dan untuk mengenalkan manajemen konflik berbasis sekolah pada setiap elemen sifatnya bertahap, agar bisa diterima oleh semua kalangan, sehingga bisa meminimalisir adanya penolakan. Namun demikian juga menjadi hambatan tersendiri dalam implementasinya bisa segera diterapkan untuk bisa diinstitutionalisasi di sekolah SMPN 2 Larangan.

Adapun hambatan lain adalah tidak konsisten terhadap penerapan manajemen konflik berbasis sekolah. Padahal penerapannya harus bersifat kontinuitas, yaitu ketika ada pergantian kepala sekolah lagi yang belum tentu melanjutkan, serta konsisten terhadap penerapan manajemen konflik berbasis sekolah yang sudah berlangsung dan bahkan penerapannya belum sepenuhnya terlaksana. Karena penerapan manajemen konflik berbasis sekolah merupakan panduan dalam jangka panjang.

Adapun untuk penerapannya sendiri adalah kepekaan dari para pendidik terhadap perkembangan zaman yang di hadapi oleh peserta didik yang semuanya serba elektronik. Sehingga pola social siswa bukan hanya di bentuk di sekolah tapi juga melalui media digital, sehingga yang demikian sulit di jangkau oleh para pendidik. Yang sangat berdampak terhadap pola social siswa adalah penggunaan media elektronik yang tidak di manfaatkan secara maksimal, Tindakan kekerasan, criminal dan penyimpangan lainnya tak jarang yang vulgar di media social. Bahkan kenakalan reamaja terkadang di anggap sebagai trend tersendiri. Sehingga nilai-nilai yang di tanamkan di sekolah belum sepenuhnya berbanding sama dengan lingkungan yang di miliki oleh setiap peserta didik, hususnya jejraing media sosial.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah di SMPN

2 Larangan Pamekasan yaitu bapak syamsul arifin, S.Pd:

pergantian kepala sekolah juga bisa menjadi penghambat penerapan manajemen konflik berbasis sekolah, pasalnya resolusi konflik yang sudah di terapkan harus setop karena ada pergantian kepala sekolah yang kurang memperhatikan pada manajemen konflik berbasis sekolah. Sealian itu jika ada guru atau tenaga pendidik yang kurang responsip, atau menganggap sepele, sehingga sulit untuk di lembagakan. Kalo secara penerapan, yang menghambat adanya penerapan manajemen konflik adalah penyalah gunaan digital, yang marak menjadi problem terhadap pola social siswa, seperti konten kekerasan dan perilaku menyimpang lainnya.⁸

Faktor penghambat dalam penerapan manajemen konflik berbasis sekolah di SMPN 2 larangan adalah kurangnya dukungan dari para wali atau orang tua siswa. Pasalnya ada sebagian yang menilai bahwa usia

⁸ Syamsul Arifin, Kepala Sekolah SMPN 2 Larangan, Wawancara Langsung (17 april 2023).

remaja adalah usia yang wajar untuk melakukan kenakalan, sehingga jika ada yang melakukan pelanggaran cukup di beri sangsi saja, sehingga ketika sekolah melakukan sosialisasi tentang pentingnya manajemen konflik sangat sulit untuk mendapatkan respon positif dari orang tua siswa. padahal keluarga ataupun masyarakat merupakan narasumber utama siswa untuk bisa di aplikasikan dalam kehidupannya, begitupun dalam beraktivitas di sekolah.

Selain itu ada Sebagian orang tua atau wali masih memberikan pembelaan pada anaknya yang cenderung melakukan konflik, baik Tindakan bullying atau kekerasan fisik terhadap siwa yang lain. Sehingga juga berdampak bagi siswanya. Dan ketika sekolah memberikan arahan yang di jadikan pedoman adalah pembelaan dari orang tua.

sekolah juga mengalami kesulitan untuk melakukan koordinasi dengan orang tua siswa atau wali siswa, karena ketika ingin di adakan pertemuan yang membahas tentang resolusi konflik, orang tua atau wali lebih memilih untuk memfokuskan pada pola perkembangan pelajaran siswa. Selain itu, ketika ingin di adakan pertemuan banyak wali atau orang tua siswa yang tidak hadir, sehingga sekolah sulit untuk menyimpulkan antara karena factor kesibukan orang tua siswa atau memang suratnya tidak di sampaikan oleh peserta didik.

Sesuai dengan dari hasil wawancara dengan bapak hairus S.Pd yang merupakan guru bimbingan konseling di SMPN 2 Larangan Pamekasan yang mengatakan:

Yang menghambat penerapan manajemen konflik berbasis sekolah di SMPN 2 Larangan adalah kurangnya dukungan dari para wali atau orang tua siswa. Ada yang memberikan pembeledaan pada anaknya sekalipun melakukan kekerasan, ada yang menilai remaja nakal itu sudah menjadi lumrah untuk usia remaja. dan ketika sekolah ingin melakukan pertemuan dengan orang tua atau wali siswa, banyak yang tidak hadir, sehingga kami kesulitan untuk melakukan sosialisasi resolusi konflik pada mereka.⁹

Dalam penerapan peer mediation tidak semua siswa bisa menguasai materi, dan Sebagian ada yang memang tidak ada keberanian untuk menjadi mediator, atau memberikan pendapat dalam proses mediasi, selain itu siswa merasa jika proaktif dalam proses mediasi, khawatir dianggap mencampuri urusan orang lain oleh pihak yang terlibat konflik. oleh karena itu siswa tersebut membutuhkan motivasi dari guru supaya terbiasa untuk mengungkapkan sebuah pendapatnya ketika proses peer mediation.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh salah satu siswa kelas VIII SMPN 2 Larangan Pamekasan, yaitu Dea Saputri salah satu siswi yang mempunyai kemampuan dalam mengikuti kegiatan media sejawat tapi takut untuk memberikan pendapat kepada teman-temannya. “Saya memang takut kak untuk memberikan pendapat ketika teman-teman sedang melakukan mediasi sejawat. Takutnya saya, karena tidak terbiasa berbicara depan teman-teman, dan saya takut di anggap mencampuri urusan orang lain”.¹⁰

⁹ Hairus, Guru Bimbingan Konseling Sekolah SMPN 2 Larangan, Wawancara Langsung (17 april 2023).

¹⁰ Dea Saputri, Siswa Kelas VIII, *Wawancara Langsung* (17, mei, 2023).

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa factor penghambat implementasi manajemen konflik berbasis sekolah di SMPN 2 Larangan adalah penggunaan media elektronik yang kurang maksimal, sehingga berdampak negatif bagi kognisi dan psikologis siswa, apalagi konten-konten kekerasan, dan perilaku menyimpang lainnya. Selain itu factor orang tua atau masyarakat yang kurang responsive terhadap sosialisasi manajemen konflik berbasis sekolah. Selain itu kurangnya motivasi bagi siswa untuk berani dalam proses mediasi. Nah faktor ini yang membutuhkan motivasi dari guru supaya siswa tersebut aktif kembali dan tidak merasa takut untuk memberikan argumentasinya kepada teman-temannya.

d. Solusi Faktor Penghambat Penerapan Manajemen Konflik Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Suasana Kondusif Belajar Siswa di SMPN 2 Larangan Pamekasan?

Dalam menghadapi faktor penghambat kepala mempunyai solusi dalam menerapkan manajemen konflik berbasis sekolah. Yaitu dengan mengadakan pelatihan atau membuat forum dengan semua elemen sekolah, baik guru, tata usaha, petugas kebun, petugas kantin dan elemen lainnya, agar bisa paham terhadap manajemen konflik berbasis sekolah, sehingga bisa memiliki visi dan misi bersama.

Berikutnya Peneliti melakukan observasi kepala sekolah, yaitu Bapak Syamsul Arifin S.Pd. berikut hasil wawancaranya: “Dalam mengatasi hal ini saya sebagai kepala sekolah akan memberikan pelatihan dan pendampingan pada guru-guru, tata usaha, bahkan sampai

tugang kebun pun. Untuk memberi penjelasan materi manajemen konflik berbasis sekolah terlebih agar bisa bekerja sama”.¹¹



Gambar. 4.5 Pelatihan terhadap guru

Penggunaan gadget memang bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi lembaga akan melakukan koordinasi dengan orang tua siswa, ataupun wali untuk melakukan pengontrolan dan memberikan pendampingan khusus pada siswa, dan bisa bekerja sama dalam menanamkan pentingnya perdamaian dan nirkekerasan. Adapun penggunaan gadget di sekolah masih terbilang normal, karena siswa juga di benturkan dengan jadwal kelas dan aneka ragam kegiatan di sekolah, sehingga siswa bisa memajemen waktu dalam penggunaan media elektronik.

¹¹ Syamsul Arifin, Kepala Sekolah SMPN 2 Larangan, Wawancara Langsung (17 april 2023).

Sesuai dengan dari hasil wawancara dengan bapak hairus S.Pd yang merupakan guru bimbingan konseling di SMPN 2 Larangan Pamekasan yang mengatakan: “Kami akan melakukan koordinasi dengan orang tua siswa, ataupun wali untuk melakukan pengontrolan husus pada siswa dalam penggunaan media elektronik, kalau penggunaan gadget di sekolah masih terbilang normal, karena para siswa juga di benturkan dengan jadwal kelas dan aneka ragam kegiatan sekolah”.¹²



Gambar. 4.6 Koordinasi bersama orang tua wali Murid

Dalam upaya memperoleh partisipasi massif dari orang tua siswa sekolah SMPN 2 larangan akan melakukan analisis terlebih dahulu, mengenai letak geografis, perekonomian, budaya, dan pola pikir masyarakat, khususnya para orang tua siswa agar bisa memahami mereka, sehingga lebih mudah untuk melakukan pendekatan. Kemudian

¹² Hairus, Guru Bimbingan Konseling Sekolah SMPN 2 Larangan, Wawancara Langsung (17 april 2023).

juga akan menganalisis lebih lanjut factor-faktor yang menyebabkan minimnya partisipasi orang tua siswa, terhadap program manajemen konflik yang melibatkan orang tua siswa seperti program menolak kekerasan (*zero tolerance for violence*). Sehingga akan mudah untuk mencari solusi, karena tanpa keterlibatan orang tua para siswa, implementasi manajemen konflik berbasis sekolah akan sulit untuk berjalan secara maksimal.

seperti hasil wawancara secara langsung kepada kepala sekolah SMPN 2 Larangan, yaitu Bapak Syamsul Arifin S.Pd. berikut hasil wawancaranya:

Kami melakukan analisis terlebih dahulu, mengenai letak geografis, perekonomian, budaya, dan pola pikir masyarakat, khususnya para orang tua siswa sehingga lebih mudah untuk melakukan pendekatan. Dan kami juga akan menganalisis lebih lanjut factor-faktor yang menyebabkan minimnya partisipasi orang tua siswa, terhadap program manajemen konflik yang melibatkan mereka.¹³

Adapun solusi terhadap siswa yang tidak mempunyai keberanian untuk menjadi mediator, atau memberikan pendapat dalam proses peer mediation adalah dengan memberikan pelatihan husus seperti public speaking dan motivasi untuk menanamkan rasa percaya diri agar bisa berargumentasi di depan public. Adapun siswa yang tidak menguasai materi, dan siswa merasa jika proaktif dalam proses mediasi, khawatir dianggap mencampuri urusan orang lain oleh pihak yang terlibat konflik. Adalah dengan men follow up Kembali pelatihan mediasi sejawat, sehingga siswa benar- benar paham terhadap maksud dan tujuan peer

¹³ Syamsul Arifin, Kepala Sekolah SMPN 2 Larangan, Wawancara Langsung (17 april 2023).

mediation. Dan sekolah akan memberikan jaminan keamanan, baik di sekolah maupun di luar, dengan melaporkan pada guru yang memandu mediasi atau pada guru bimbingan konseling. Jika pihak yang terbat konflik ada hal yang tendensi mengancam pada siswa. Sehingga nanti akan memberikan tindakan khusus pada siswa yang terlibat konflik.

Sesuai dengan dari hasil wawancara dengan bapak Hairus S.Pd yang merupakan guru bimbingan konseling di SMPN 2 Larangan Pamekasan yang mengatakan:

Siswa yang tidak mempunyai keberanian untuk menjadi mediator, kami akan memberikan pelatihan khusus seperti public speaking dan motivasi agar lebih percaya diri untuk berargumentasi. Untuk solusi siswa yang tidak menguasai materi, dan siswa yang merasa khawatir jika berkomentar dianggap mencampuri urusan orang lain. Adalah dengan men follow up Kembali pelatihan mediasi sejawat. Dan memberikan jaminan keamanan, baik di sekolah maupun di luar, dengan melaporkan pada guru yang memandu mediasi atau pada guru bimbingan konseling. Jika ada gerakan yang tendensi mengancam pada siswa.¹⁴

2. Temuan Penelitian

a. Penerapan Manajemen Konflik Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Suasana Kondusif Belajar Siswa Di SMPN 2 Larangan Pamekasan.

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang didapat maka memperoleh hasil temuan sebagai berikut:

¹⁴ Hairus, Guru Bimbingan Konseling Sekolah SMPN 2 Larangan, Wawancara Langsung (17 april 2023).

- 1) Dalam mensosialisasikan manajemen konflik berbasis sekolah guru bimbingan konseling di mandatkan kepala sekolah dalam pengimplementasiannya
- 2) Melaksanakan mediasi sejawat dalam proses penyelesaian konflik yang dihadapi oleh siswa
- 3) Melibatkan orang tua atau wali siswa dalam menerapkan resolusi konflik

b. Faktor Penghambat Implementasi Manajemen Konflik Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Suasana Kondusif Belajar Siswa di SMPN 2 Larangan Pamekasan.

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang didapat maka memperoleh hasil temuan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pemahaman terhadap penerapan manajemen konflik berbasis sekolah
- 2) Tidak ada controlling terhadap peserta didik dalam penggunaan gadge atau media digital
- 3) Minimnya partisipasi dari orang tua terhadap manajemen konflik berbasis sekolah
- 4) Kurangnya motivasi terhadap siswa untuk berani menyampaikan argumentasi ketika peer mediation

c. Solusi Faktor Penghambat Penerapan Manajemen Konflik Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Suasana Kondusif Belajar Siswa di SMPN 2 Larangan Pamekasan.

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang didapat maka memperoleh hasil temuan sebagai berikut:

- 1) Mengadakan pelatihan atau membuat forum dari beberapa elemen tentang manajemen konflik berbasis sekolah
- 2) Melakukan koordinasi kepada orang tua untuk melakukan controlling Terhadap anaknya dalam penggunaan gadge
- 3) Melakukan analisis terhadap pola kehidupan maupun masyarakat agar mudah melakukan pendekatan

B. Pembahasan

Pada pembahasan ini peneliti menyatukan hasil penelitian dengan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Sebagaimana yang telah ditegaskan dari data yang telah diperoleh baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dari hasil tersebut dikaitkan dengan teori yang ada dan dibahas sebagai berikut:

1. Penerapan Manajemen Konflik Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Suasana Kondusif Belajar Siswa di SMPN 2 Larangan Pamekasan.

Dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan pada saat observasi dan wawancara dengan kepala sekolah, dan guru bimbingan konseling dan siswa di SMPN 2 Larangan Pamekasan.

1. kepala sekolah menjelaskan bahwa dalam menerapkan manajemen konflik berbasis sekolah tidaklah mudah, ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, pertama kami memberikan pemahaman terlebih

dulu kepada para guru-guru maupun tenaga pendidik. Tentang penerapan manajemen konflik berbasis sekolah sesuai dengan lokal wisdom yang ada di SMPN 2 Larangan, baik secara personal maupun secara universal dengan mengadakan kegiatan pelatihan maupun pendampingan kepada guru-guru maupun tenaga pendidik di SMPN 2 Larangan.

Jadi kepala sekolah sebagai eksekutor sekaligus implementator dituntut untuk memahami manajemen konflik untuk membuat orang lain mau bersedia dan bekerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan Bersama.¹⁵

2. Manajemen konflik berbasis sekolah di SMPN 2 Larangan adalah suatu cara atau seni yang di gunakan di SMPN 2 Larangan dalam mengelola sekolah untuk meminimalisir konflik yang terjadi di sekolah, baik konflik di dalam individu maupun konflik antar perorangan serta konflik yang disebabkan dari dalam maupun luar sekolah.
3. Selain itu kepala sekolah juga di bantu oleh guru bimbingan konsling (BK) dalam menerapkan strategi manajemen konflik berbasis sekolah, dan bahkan terlibat secara langsung dengan pesertadidik. guru bimbingan konsling mengadakan program Peer mediation, yaitu mediasi yang di lakukan terhadap dua siswa atau lebih dengan menggunakan bantuan mediator, atau orang ketiga yang bertugas untuk menyelesaikan problem atau konflik yang sedang terjadi, uniknya pihak ketiga merupakan salah satu dari siswa juga. Yang tentunya sudah mengikuti pelatihan mediasi. Peer mediation sendiri di rancang secara terstruktur sehingga siswa

¹⁵ Winda sari. " Penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan perpustakaan " *Jurnal Ilmu informasi kepustakaan dan kearsipan*, volume 1, edisi September 2012.41

memungkinkan bisa menyelesaikan problemnya dengan bantuan dari mahasiswa lain. Kelas mediasi di Kelola oleh guru yang sudah melakukan pelatihan Peer mediation. Adapun produk akhirnya adalah bisa menyelesaikan konflik atau problem yang di alami oleh siswa, dengan bantuan siswa lain dengan di damping oleh guru yang memandu jalanya mediasi, dengan berupa kesepakatan bersama. sehingga memelurkan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis dan memikirkan cara yang tepat untuk melaknakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan.¹⁶

4. Untuk menciptakan suasana aman di sekolah juga di tentukan dari lingkungan fisik ataupun lingkungan non-fisik sekolah. Sehingga sekolah harus bekerjasama dengan orang tua atau wali siswa dan juga masyarakat untuk mengatasi komunikasi agresif, dan kekerasan fisik di dalam keluarga maupun di masyarakat, sehingga manajemen konflik berbasis sekolah bisa di terapkan secara maksimal. dan sekolah menjadi tempat aman dan aman, sehingga bisa menciptakan suasana kondusif belajar bagi siswa.

2. Faktor Penghambat Implementasi Manajemen Konflik Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Suasana Kondusif Belajar Siswa di SMPN 2 Larangan Pamekasan.

Dalam penerapan manajemen konflik berbasis sekolah dalam meningkatkan suasana kondusif belajar siswa di SMPN 2 Larangan

¹⁶ Winda sari. " Penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan perpustakaan" *Jurnal Ilmu informasi kepustakaan dan kearsipan*, volume 1, edisi September 2012.41

Pamekasan mengalami faktor penghambat dalam proses pembelajaran berlangsung.

1. Pada bagian ini, hal yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembelajaran manajemen konflik berbasis sekolah yaitu Kurangnya pemahaman pendidik dan tenaga pendidik terhadap penerapan manajemen konflik berbasis sekolah sehingga Persiapan kurang memadai padahal penerapannya memerlukan pengambilan keputusan dari pihak yang terlibat aktif di sekolah, seperti para pemangku kepentingan di sekolah. Tidak ada controlling terhadap peserta didik dalam penggunaan gadge atau media digital.

Pemahaman tentang manajemen konflik sangatlah penting, karena Manajemen konflik adalah pengendalian terhadap sebuah konflik yang terjadi agar bisa dihindari, dikurangi, atau dihilangkan.¹⁷

2. Adapun faktor penghambat lain adalah Minimnya partisipasi dari orang tua terhadap manajemen konflik berbasis sekolah. Padahal orang tua memegang peran penting demi terlaksananya resolusi konflik. Karena pola interaksi siswa juga di tentukan oleh keluarga. Sehingga apabila orang tua kurang partisipatif terhadap program sekolah, maka juga akan berdampak terhadap peserta didik. Karena penerapan manajemen konflik berbasis sekolah tentu juga melibatkan orang tua.
3. Selain itu dalam proses peer mediation terdapat siswa yang tidak berani untuk menyampaikan pendapat atau bahkan menjadi mediator, apalagi jika kurangnya motivasi dan pelatihan husu dari guru supaya terbiasa

¹⁷ Ulya Amelia, Suryadi, manajemen konflik, jurnal improvement Vol.6 No.1

untuk mengungkapkan sebuah di muka umum. Pada siswa masih dalam proses tahap belajar.

3. Solusi Faktor Penghambat Penerapan Manajemen Konflik Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Suasana Kondusif Belajar Siswa di SMPN 2 Larangan Pamekasan.

1. Dalam penerapan manajemen konflik berbasis sekolah, guru mengalami hambatan ketika proses pembelajaran berlangsung, kepala sekolah mempunyai solusi dalam menerapkan manajemen konflik berbasis sekolah. Yaitu dengan mengadakan pelatihan atau membuat forum dengan semua elemen sekolah, baik guru, tata usaha, petugas kebun, petugas kantin dan elemen lainnya, agar bisa paham terhadap manajemen konflik berbasis sekolah , sehingga bisa memiliki visi dan misi.

Strategi atau metode yang tepat sangatlah penting untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kepala sekolah perlu memberikan pelatihan manajemen konflik untuk menemukan strategi yang tepat jika konflik datang, disamping itu inovasi diperlukan dari mereka.¹⁸

2. lembaga akan melakukan koordinasi dengan orang tua siswa, ataupun wali untuk melakukan pengontrolan dan meberikan pendampingan khusus pada siswa, dan bisa bekerja sama dalam menanamkan pentingnya perdamaian dan nirkekerasan. Adapun penggunaan gadget di sekolah masih terbilang normal, karena siswa juga di benturkan dengan jadwal kelas dan aneka ragam kegiatan di sekolah, sehingga siswa bisa memajemen waktu dalam penggunaan media elektronik.

¹⁸ Ulya Amelia, Suryadi, manajemen konflik, jurnal improvement Vol.6 No.1

3. menganalisis lebih lanjut factor-faktor yang menyebabkan minimnya partisipasi orang tua siswa, terhadap program manajemen konflik yang melibatkan orang tua siswa seperti program menolak kekerasan (*zero tolerance for violence*). Sehingga akan mudah untuk mencari solusi, karena tanpa keterlibatan orang tua para siswa, implementasi manajemen konflik berbasis sekolah akan sulit untuk berjalan secara maksimal.
4. Adapun solusi terhadap siswa yang tidak mempunyai keberanian untuk menjadi mediator, atau memberikan pendapat dalam proses peer mediation adalah dengan memberikan pelatihan husus seperti public speaking dan motivasi untuk menanamkan rasa percaya diri agar bisa berargumentasi di depan publik. Adapun siswa yang tidak menguasai materi, dan siswa merasa jika proaktif dalam proses mediasi, khawatir dianggap mencampuri urusan orang lain oleh pihak yang terlibat konflik. Adalah dengan men follow up Kembali pelatihan mediasi sejawat, sehingga siswa benar- benar paham terhadap maksud dan tujuan peer mediation. Dan sekolah akan memberikan jaminan keamanan, baik di sekolah amupun di luar, dengan melaporkan pada guru yang memandu mediasi atau pada guru bimbingan konseling. Jika pihak yang terbat konflik ada hal yang tendensi mengancam pada siswa. Sehingga nanti akan memberikan tindakan husus pada siswa yang terlibat konflik.